

Analisis Anggaran Infrastruktur Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (JAMULA) di Kabupaten Lamongan Tahun 2025

Nurrahma Ayu Undzira. A^{1*}, Eva Hany Fanida², Melda Fadiyah Hidayat³

^{1,2,3} Universitas Negeri Surabaya

* E-mail Korespondensi: 25040674360@mhs.unesa.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 01-05-2026

Revision: 20-05-2026

Published: 22-05-2026

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.451

A B S T R A K

Percepatan pembangunan infrastruktur yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan menjadi fokus utama dalam pemerintahan. Suksesnya pembangunan infrastruktur daerah merupakan ciri keberhasilan suatu negara. Salah satu infrastruktur yang menjadi fondasi utama negara adalah pembangunan fisik dan konektivitas berupa jalan, yang mana merupakan sarana transportasi untuk keberlangsungan konektivitas antarwilayah sehingga akan membuka pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mendukung misi menciptakan infrastruktur yang handal, merata, dan berkeadilan Pemerintah Kabupaten Lamongan mengeluarkan program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (JAMULA). Program ini muncul sebagai program prioritas Pemerintah Kabupaten Lamongan. Anggaran dana yang digunakan untuk program jamula diambil dari APBD Kabupaten Lamongan. Tujuan analisis ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran dana dari program JAMULA di tahun 2025 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Analisis ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis studi ini adalah jika sesuai data implementasi program Jalan Mulus dan Alus Lamongan sudah berjalan sedemikian rupa, namun fakta di lapangan sampai saat ini masih banyak sekali desa-desa di Kabupaten Lamongan yang akses jalannya masih kurang layak, bahkan di beberapa desa sudah tergolong rusak parah sehingga seringkali terjadi banjir yang berkelanjutan. Jika program ini sudah dijalankan dan dilaksanakan dengan baik seharusnya hal-hal semacam itu akan minim terjadi. Dengan demikian, program JAMULA dinilai belum maksimal merata, menimbulkan keluhan warga terkait kualitas dan kecepatan perbaikan jalan.

Kata Kunci: JAMULA, Infrastruktur, Lamongan

A B S T R A C T

Abstract Accelerating targeted, integrated, and sustainable infrastructure development is a primary focus of government. The success of regional infrastructure development is a hallmark of a nation's success. One of the infrastructures that

Acknowledgment

form the main foundation of a nation is physical development and connectivity in the form of roads, which are a means of transportation for the continuity of inter-regional connectivity, thereby unlocking regional economic growth. To support the mission of creating reliable, equitable, and equitable infrastructure, the Lamongan Regency Government launched the Jalan Mantap dan Alus Lamongan (JAMULA) program. This program emerged as a priority program of the Lamongan Regency Government. The budget used for the JAMULA program is taken from the Lamongan Regency Regional Budget (APBD). The purpose of this analysis is to determine the effectiveness of the JAMULA program budget in 2025 in improving the welfare of the local community. This analysis uses a qualitative descriptive research method, with data collection techniques such as in-depth interviews, observation, and documentation. The results of this study's analysis indicate that, according to the data, the implementation of the Lamongan Smooth and Alus Roads program has been progressing well. However, in reality, many villages in Lamongan Regency still have inadequate road access, with some villages even being severely damaged, resulting in frequent and ongoing flooding. If the program had been implemented and executed properly, such issues should have been minimized. Therefore, the JAMULA program is considered to have not been optimally distributed, leading to complaints from residents regarding the quality and speed of road repairs.

Key word: JAMULA, infrastructure, Lamongan

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur jalan menjadi program prioritas pemerintah Indonesia dikarenakan banyaknya manfaat ketika infrastruktur jalan dalam keadaan baik. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa infrastruktur prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan (Aslur & Tukiman, 2023). Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa infrastruktur prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lamongan juga diatur melalui Perbup No. 5 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKPD) untuk infrastruktur desa. Pembangunan infrastruktur memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan produktivitas, daya saing global, serta untuk kesejahteraan masyarakat dengan

mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut (Potres, 1976), pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat”. Selanjutnya, (Ginjar Kartasamitra, 1994) menyatakannya sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana” (Alim et al., 2022). Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan mengenai infrastruktur jalan merupakan salah satu upaya pemerintah yang terencana untuk meningkatkan aksesibilitas serta untuk transformasi ekonomi yang lebih baik. Namun, di setiap program yang dijalankan pemerintah tentu saja memiliki rintangan dan hambatannya masing-masing.

Keberhasilan pada pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari fisik yaitu berapa jumlah jalan yang telah dibangun, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut berhasil meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta kemudahan masyarakat dalam mencapai aksesibilitas yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik, sangat diperlukan sinkronasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pengelolaan dana bantuan keuangan khusus desa yang mana ini merupakan stimulus utama yang digunakan pemerintah daerah untuk memfasilitasi masyarakat, salah satunya dengan memperbaiki jalan yang rusak.

Program ini merupakan program inisiatif pemerintah daerah Kabupaten Lamongan yang bersifat super prioritas dalam upaya mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta sebagai prasarana untuk memperbaiki aktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan Jamula berstatus program super prioritas di latarbelakangi oleh dua alasan utama. Alasan yang pertama yaitu banyak ruas jalan raya yang sudah mencapai usia rusak dan alasan yang kedua yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan, terutama pasca adanya pandemi Covid-19 (Royali et al., 2024). Pemerintah Kabupaten Lamongan juga melibatkan tim teknis ahli dari Intitut Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) sebagai konsultan untuk memastikan jalan yang dibangun sesuai dengan standar kualitas.

Pengendalian keuangan dicerminkan dalam APBD, seperti kapabilitas pemerintah dalam memaksimalkan pemasukan lokal dan mendanai pengeluaran lokal dalam pengembangan daerah dan manfaat sosial (Hastuti & Nasution, 2024, sebagaimana dikutip dalam Rizqi, Firistya Sabrina; Hanifa, 2025). APBD terbentuk dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (W. Adawiyah & Kusuma, 2015, sebagaimana dikutip dalam Rizqi, Firistya Sabrina; Hanifa, 2025). Terdapat perubahan format APBD,

dimana pendapatan terbagi menjadi tiga klasifikasi, diantaranya pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lainlain daerah yang sah (Halim, 2007, sebagaimana dikutip dalam Rizqi, Firistya Sabrina; Hanifa, 2025). Dalam komponen pendapatan terdapat sumber yang menyumbang utama diantaranya adalah pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan (Suratmi & Nur, 2023, sebagaimana dikutip dalam Rizqi, Firistya Sabrina; Hanifa, 2025).

APBD tidak hanya menunjukkan kapasitas fiskal suatu daerah, tetapi juga mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merencanakan, mendistribusikan, dan mengelola asset guna meraih sasaran pembangunan yang telah diputuskan. Keberhasilan dalam pengelolaan APBD ditunjukkan dengan pemerintah daerah mampu mendayagunakan seluruh aset dan potensi, baik dari keanekaragaman alam yang dimiliki, sumber daya manusia, maupun infrastruktur, untuk memastikan tercapainya pemerataan dan keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan di seluruh wilayahnya (Rizqi, Firistya Sabrina; Hanifa, 2025).

Keberhasilan implementasi kebijakan digambarkan sebagai keberhasilan untuk mencapai tujuan kebijakan Jamula, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan. Implementasi jalan raya ruas Sukodadi-Sumberwudi di Desa Pucangro dapat menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan Jamula karena memiliki peran penting bagi Kabupaten Lamongan dan berstatus sebagai proyek percontohan (Royali et al., 2024). Namun pada realita di lapangan, menurut penulis masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan khususnya di Kecamatan Solokuro, bahkan problematika jalan di wilayah Kabupaten Lamongan dijadikan *Black Campaign* (Kampanye hitam) untuk menyudutkan calon tertentu hal ini menimbulkan pertanyaan besar pada benak penulis, apakah memang program ini sudah dijalankan namun masyarakat tidak terdampak, atau paradigma masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan infrastruktur jalan mana yang boleh dikelola oleh kabupaten dan mana yang tidak (Qondas & Hadi, 2026).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisis, serta memotret suatu peristiwa, fenomena, atau situasi sosial secara mendalam berdasarkan fakta. Data yang dihasilkan yaitu berupa kalimat, kata-kata, atau deskripsi objek. Untuk mendapat informasi yang bersifat fakta, penulis menggunakan data yang dikumpulkan dari hasil analisis studi pustaka dengan teknik pengumpulan data melalui eksplorasi karya ilmiah, dengan menggunakan langkah-langkah penelitian yang

meliputi pemeriksaan, analisis, dan penentuan apa yang telah diketahui tentang subjek melalui membaca buku, artikel, referensi, dan temuan penelitian lainnya yang memiliki fokus data menggunakan sumber pustaka, dan bukan data primer lapangan untuk mendapatkan fakta konseptual atau teoritis.

HASIL

Gambaran Umum Program JAMULA

Program Jalan Mantap dan Alus Lamongan (JAMULA) merupakan program super prioritas pemerintah Kabupaten Lamongan pada masa pemerintahan Bupati Yuhronur Efendi bersama Wakil Bupati Abdul Rouf pada periode pertama tahun 2021-2025. Program ini berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan secara merata hingga ke daerah pelosok desa Kabupaten Lamongan. Tentunya program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan Kabupaten Lamongan guna mendukung mobilitas masyarakat tanpa keterbatasan kerusakan jalan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan memperbaiki fasilitas umum yang sudah seharusnya menjadi hak masyarakat.

JAMULA merupakan salah satu program prioritas dan inovasi dari Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas PU Binamarga dan kolaborasi dengan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam membangun Dynamic Governance Program Jamula diharapkan ingin mewujudkan infrastruktur handal dan berkelanjutan Lamongan. Serta difokuskan pada peningkatan kepuasan layanan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Program jamula diharapkan juga mampu memperlancar segala bentuk mobilitas serta perekonomian masyarakat Lamongan (Khitam et al., 2025).

pendanaan tidak ada masalah, karena program Jamula dianggarkan pada tahun 2021 setelah Bupati dilantik menjadi bupati lalu program Jamula ini muncul dan masuk pada RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026. Pelaksanaan program Jamula dalam hal pembiayaan sudah dilakukan perencanaan sebelumnya dan tidak dapat kendala pada saat penganggaran dilaksanakan (Aslur & Tukiman, 2023)

Berdasarkan peran vital PAD dan dana perimbangan dalam APBD, PAD mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam mengelola sumber daya lokal, sedangkan dana perimbangan merupakan instrumen untuk meminimalkan kesenjangan fiskal antar daerah. Namun, di banyak daerah termasuk Kabupaten Lamongan, terdapat ketidakseimbangan dalam komposisi PAD dan dana perimbangan yang mengarah pada ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemerintah daerah dapat menjalankan kegiatan analisis kinerja pemerintah daerah dengan pengelolaan keuangan daerah bisa menggunakan salah satu alat ukur yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sebelumnya, yaitu berupa analisis rasio pada APBD. Selanjutnya, temuan atas hasil analisis tersebut bisa digunakan sebagai standar pengukuran kontribusi setiap sumber pendapatan daerah dalam pembentukan pendapatan daerah dan mengukur efektivitas untuk merealisasikan pendapatan daerah (W. Adawiyah & Kusuma, 2015, sebagaimana dikutip dalam Rizqi, Firistya Sabrina; Hanifa, 2025).

Menjadi program super prioritas Pemkab Lamongan, Program Jamula (Jalan Alus dan Mulus Lamongan) dan Program Dana Dusun, kini mulai direalisasikan. Program yang menelan anggaran Rp. 200 miliar untuk perbaikan jalan, jembatan dan pembebasan lahan ring road utara, serta Rp 50,085 miliar untuk dana dusun, ini diharapkan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dapat menumbuhkan kembangkan potensi desa serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Momentum.com, 2022).

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Program Jalan Mulus dan Alus Lamongan (JAMULA) pada tahun 2025 menargetkan pembangunan sebanyak 38 ruas jalan. Per bulan Oktober 2025 kemantapan jalan di Kabupaten Lamongan mencapai 400,138 Km atau 59,97 persen. Sebanyak 20 ruas (14,47 Km) sudah dilaksanakan proyek pekerjaan peningkatan jalan, anggaran program ini diambil melalui dana APBD sebesar 35,5 miliar dan telah rampung dilaksanakan. Lalu, untuk sisa 18 ruas jalan lainnya dibangun pada bulan Oktober hingga Desember 2025. Pembangunan yang menjangkau 16,68 Km ini mengalokasikan anggaran sebesar 48 miliar. Saat melakukan peninjauan ruas jalan, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur,

utamanya jalan akan terus berlanjut ditahun-tahun berikutnya. Mayoritas jalan Kabupaten sudah terjangkau program JAMULA. Selain melaksanakan peningkatan jalan (rekonstruksi) pemerintah juga akan melaksanakan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala untuk jalan. Pemeliharaan rutin dilaksanakan di 48 ruas jalan dengan total panjang 24,70 Km. Sedangkan pemeliharaan berkala dilaksanakan di 21 ruas jalan dengan total panjang 32,18 Km. Melalui langkah strategis tersebut, panjang jalan di Kabupaten Lamongan hingga 31 Desember 2025 bisa mencapai 64,79 persen atau 432,297 Km dari total panjang jalan 667 Km.



Gambar 2. Perencanaan Perbaikan Jalan Program JAMULA Tahun 2025

sumber: Radar Lamongan

Berdasarkan data di atas sangat diharapkan program JAMULA ini mampu menjadi sarana konektivitas antarwilayah sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka keterisolasian wilayah, serta mempermudah penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan umum. Namun, sampai detik ini data dengan yang terjadi di lapangan justru berbanding terbalik. Faktanya jalan-jalan desa masih mengalami kerusakan parah. Banyak jalan-jalan yang berlubang, aspal mengelupas, dan ganangan air dimana-dimana. Di balik klaim keberhasilan JAMULA *by* data tersebut, program ini masih bersifat jangka pendek yang menunjukkan bahwa implementasi program ini belum sepenuhnya optimal. Daerah desa terpencil per Maret 2026 masih terjadi bencana banjir yang mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu. Lalu, terkait anggaran dana yang telah dikeluarkan, apakah pemerintah sudah benar-benar mengalokasikan semua dana untuk program prioritas ini atau justru diputarbalikkan oleh petinggi-petinggi daerah. Karena menurut lapangan program ini belum dapat dinikmati secara jangka panjang.

Permasalahan tersebut tentunya sangat membutuhkan perhatian khusus serta intervensi dari pemerintah mengatasi masalah-masalah yang terjadi khususnya di program JAMULA.

Intervensi tersebut dapat berupa kebijakan pemerintah terkait transparansi anggaran, program prioritas, dan kecepatan pembangunan infrastruktur jalan. Adanya intervensi khusus dari pemerintah diharapkan dapat mengurangi kerusakan jalan desa, penanggulangan bencana, serta perbaikan sarana transportasi yang lebih merata dan maksimal. Namun, saat ini program JAMULA masih belum terealisasi dengan maksimal, karena di lapangan masyarakat masih mengalami kesulitan terkait akses jalan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim keberhasilan program *by data* dengan implementasinya di lapangan.

Hambatan Program JAMULA

Tentunya pada program JAMULA yang dijalankan pemerintah ini, pasti memiliki hambatan serta tantangan. Hambatan-hambatan tersebut yaitu dapat berupa pertama, faktor cuaca dan bencana. Hujan yang lebat sering kali mengganggu pekerjaan fisik di lokasi pengerjaan perbaikan jalan. Selain itu, beberapa daerah di Lamongan juga sering langganan terjadi banjir, seperti di daerah Bengawan Njero. Hal ini membuat jalan yang baru saja di perbaiki bisa cepat rusak jika sistem drainasenya tidak dibangun dengan baik dan terintegritas. Kedua, keterbatasan kemampuan keuangan daerah, walaupun JAMULA adalah program prioritas, namun anggaran Kabupaten Lamongan masih terbatas untuk bisa meng-*cover* semua biaya perbaikan jalan sekaligus. Ketiga, yaitu beban kendaraan, jalan utama di kecamatan sering dilalui oleh kendaraan yang membawa muatan melebihi batas maksimum. Hal ini membuat umur jalan lebih singkat dibandingkan dengan yang direncanakan dalam analisis anggaran awal.

SIMPULAN

Implementasi program jamula adalah sebuah solusi dalam percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan dan implementasi program tersebut dalam kategori baik namun belum berhasil sebab program tersebut sudah dilaksanakan dan belum tercapai sesuai target, dimana juga terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor penghambat diantaranya ialah kurangnya disposisi masyarakat terhadap program tersebut dan kurangnya kekuatan keuangan daerah dalam menunjang program super prioritas tersebut (Qondas & Hadi, 2026).

Program JAMULA pada tahun anggaran 2025 adalah bukti nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Walaupun tetap ada tantangan teknis seperti keterbata-

san dana, beban kendaraan diatas kapasitas maksimum yang sering melintas, serta faktor cuaca dan bencana di beberapa daerah. Keberhasilan program ini terlihat dari pembangunan yang semakin merata sampai ke daerah terpencil yang dapat meningkatkan akses bagi masyarakat. Karena itu, konsistensi dalam pembagian anggaran yang disertai dengan pengawasan yang ketat di lapangan adalah kunci utama agar investasi infrastruktur ini bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan untuk semua warga Lamongan.

Secara target administratif program JAMULA berhasil tercapai, banyak data yang menyatakan bahwa program ini sudah semakin banyak perbaikan jalan yang terealisasikan. Mengingat JAMULA adalah program unggulan, pemerintah daerah memberikan prioritas tinggi agar progresnya mencapai 100% tepat waktu. Namun, secara fisik dilapangan masih banyak sekali jalan yang rusak akibat hambatan-hambatan yang terjadi selama proses berjalannya program ini. Hal tersebut mengakibatkan banjir bandang yang berkepanjangan, jalan masih banyak yang rusak dan lubang-lubang, serta masih banyak sekali jalan yang kurang layak untuk digunakan sehingga akan memicu keterlambatan aktivitas ekonomi, kurangnya mobilitas yang bebas, dan menurunkan perekonomian daerah. Banyak masyarakat yang belum merasakan fasilitas jalan yang mantap dan alus, bahkan beberapa masih mengeluhkan terkait kondisi jalan yang kurang memadai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Pengaruh Current Ratio, Net Profit Margin, Debt To Equity Ratio Terhadap Dividen Payout Ratio. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 1275-1288. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i2.278>
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Ketegangan Politik Timur Tengah 2025 pada Saham Energi di Indonesia. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 239-247. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i1.111>
- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Perbandingan Abnormal return, Return saham dan Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Buyback Saham. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(2), 100-109. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i2.49>
- Amin, M. A. N. (2018). Analisis Perbandingan Abnormal return dan Trading volume activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman Pembelian Kembali Saham (Buyback Stock). *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(1), 85-99. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.42>
- Amin, M. A. N. ., Murwati, M., Oktavianti, S. ., & Saputra, B. (2026). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Operasional: Bukti dari Sektor Consumer Non-Cyclicals Pada Bursa Efek Indonesia. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 467–475. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.242>
- Alim, I. T. H., Hariyoko, Y., & Puspaningtyas, A. (2022). Implementasi Kebijakan

- Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lamongan. *Seminar Nasional 2022 “Transformasi Digital Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Pasca Pandemi,”* 1(1), 1689–1699.
- Aslur, S. S., & Tukiman, T. (2023). Implementasi Program Jalan Mantap Dan Alus Lamongan (Jamula). *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 78. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8185>
- Khitam, M. C., Anas, F., Lamongan, U. I., & Lamongan, U. I. (2025). *MENUJU KEJAYAAN LAMONGAN: PENGUATAN BIROKRASI MELALUI PROGRAM PRIORITAS DI KABUPATEN LAMONGAN*. 8, 21–29.
- Qondas, J. G., & Hadi, A. (2026). *IMPLEMENTASI PROGRAM JALAN MANTAP DAN ALUS LAMONGAN (JAMULA) TERHADAP PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMONGAN DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH*. 04(01).
- Rizqi, Firistya Sabrina; Hanifa, N. (2025). *Efektivitas dan Kontribusi PAD dan Dana Perimbangan Terhadap APBD Kabupaten Lamongan*. 5, 69–78.
- Royali, A. S., Ardhana, V., Awalia, M. N., & Sholiha, F. U. (2024). Apakah Program “Jamula” Berdampak Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Lamongan? Ditinjau Dari Teori Merilee Grindle. *Analisis*, 14(2), 317–339. <https://doi.org/10.37478/als.v14i2.4526>
- Setiani, L., & Amin, M. (2024). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio, Operating Expense To Operating Income Terhadap Perubahan Laba. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen Учредители: Universitas Pancasakti*, 5(1), 41-55. <https://doi.org/10.24905/mlt.v5i1.5>
- 1, M. (2022). *Pemkab Lamongan Implementasikan Program Super Prioritas Jamula dan Dana Dusun*. https://lamongan.memontum.com/pemkab-lamongan-implementasikan-program-super-prioritas-jamula-dan-dana-dusun#google_vignette